



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN



LAPORAN KINERJA
KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KEDUNGJATI
TAHUN 2025



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KEDUNGJATI

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 89b, Kedungjati, Grobogan, Prov. Jawa Tengah 58167
Telepon (0292) 533317, Laman kedungjati.kec.grobogan.go.id,
Pos-el keckedungjati@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN KEDUNGJATI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedungjati untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kecamatan Kedungjati.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Grobogan, 23 Februari 2026

CAMAT KEDUNGJATI



KUSPRIYATI, S.S.T.P., M.H.

NIP. 19790920 199810 2 001

Pembina Tk.I (IV/b)



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjati merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Kedungjati. Kinerja Kecamatan Kedungjati diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Kedungjati pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Grobogan, 23 Februari 2026

CAMAT KEDUNGJATI

KABUPATEN GROBOGAN



KUSPRIYATI, S.S.T.P., M.H.

NIP. 19790920 199810 2 001

Pembina Tk.I (IV/b)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	14
D. Landasan Hukum	14
E. Sistematika	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Rencana Kerja Tahun 2025	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	39
B. Realisasi Anggaran	84
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	86
BAB IV PENUTUP	100
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	
SASARAN KINERJA PEGAWAI	

BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kedungjati selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Grobogan, dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan mempunyai tugas: disebutkan Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi dan Sub Bag adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi

- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan. Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

- a) Perijinan;
- b) Rekomendasi;
- c) Koordinasi;
- d) Pembinaan;
- e) Pengawasan;
- f) Fasilitasi;
- g) Penetapan
- h) Penyelenggaraan; dan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Camat mempunyai uraian jabatan sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam lingkup tugasnya;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- c) Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
- d) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan kelembagaan desa serta kesejahteraan rakyat;
- e) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- f) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada

- bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i) Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - j) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - k) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - l) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - m) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
 - n) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - o) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- p) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- q) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- r) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- s) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- t) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- u) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, perangkat desa dan/atau kelurahan serta melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- v) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- w) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- x) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah di kecamatan;
- y) Melakukan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- z) Menyelenggarakan perizinan sesuai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya;

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang

umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur Kecamatan. Sekcam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kesekretariatan Kecamatan.
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan dengan Instansi terkait.
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- f. Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan dan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretaris Kecamatan membawahkan :

- a) Kasubag Keuangan; dan
- b) Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Kasubag Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup Kecamatan.

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyusunan program, administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protokol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam

lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian.

3. Kasi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan. Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi Tata Pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau Kelurahan;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan /atau Lurah, serta Perangkat Desa dan atau/ Kelurahan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan terhadap BPD, RW dan RT;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daerah lainnya;
- h. Fasilitasi Pemilu dan Pilkada;
- i. Penyiapan bahan pembinaan dibidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa dan/atau kelurahan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan;
- e. Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa;
- g. Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta

melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang trantibum.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang trantibum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang trantibum.
- e. Melaksanakan koorniasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas (Hansip)
- g. Penyipian bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin.
- h. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan idiologi negara, satuan bangsa, dan organisasi kemasayarakatan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang trantibum.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kasi Kesejahteraan Masyarakat

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Penyiapan bahan penyusunan program pimbingan kesejahteraan sosial;
- e. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama;

- f. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- g. Pengelolaan administrasi keluarga miskin;
- h. Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

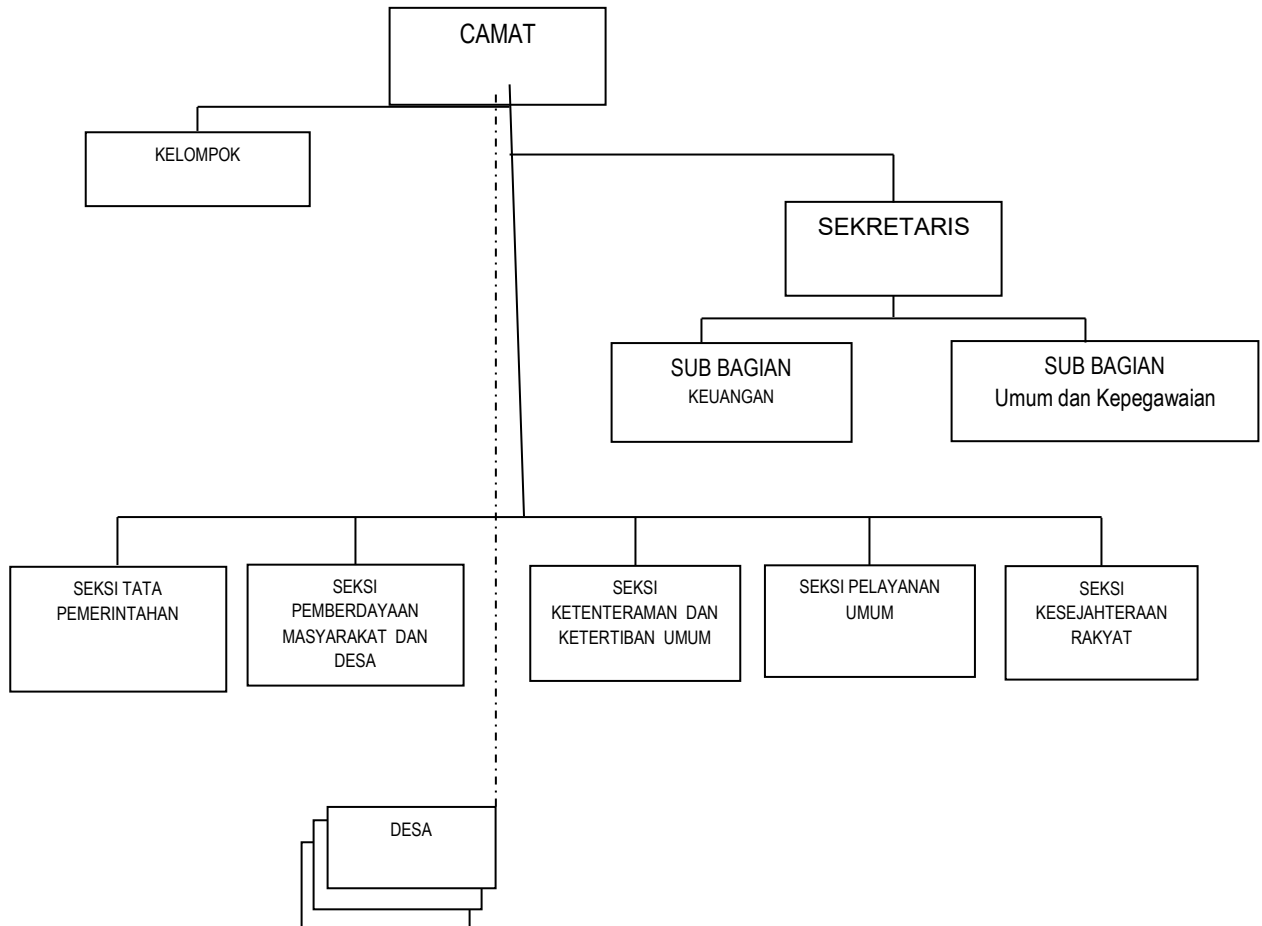
7. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi 14 administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
- d. Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KEDUNGGATI**



A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kedungjati periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Kedungjati periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjati ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

C. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana
- Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat
- Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungjati mengacu pada Misi ke-4, yaitu :

Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKA TOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2022	2024	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B 81	B 82	B 83	B 84	B 85
		1.2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	B 65	B 68	BB 70	BB 72	BB 73,5

Sumber : Renstra Kecamatan Kedungjati periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	2.1 Nilai IKM	Indeks	Nilai rata-rata kepuasan Masyarakat/publik yang dilayani di Kecamatan Kedungjati melalui pengisian kuesioner	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat internal sesuai Pemen PNRB No. 14/2017	Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kedungjati
2	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan	3.1 Nilai SAKIP	Nilai	Hasil Evaluasi Tim Kabupaten	Hasil Evaluasi Tim Kabupaten berpedoman Permenpanrb No. 12/2015	Tim Kabupaten



pemerintahan di kecamatan						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungjati Tahun 2021-2026



B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2025
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah	1.1 Sasaran - 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Indeks	B (84)



an di kecamatan					
		1.2	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggara an pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai BB (72)

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Kedungjati Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Indeks	B (84)
2	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggara n pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	BB (72)

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kedungjati :



Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungjati Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariata n yang sesuai SOP	100%	Rp 2.928.907.000
	1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Musrenbang dan tersusunnya dokumen rencana pembangunan di Kec. Grob.	1 kali	Rp 38.413.000
	2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan	100 %	Rp 2.140.938.000



		keuangan tepat waktu		
	3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp 76.318.000
	4). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 245.577.600
	5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	Rp 55.621.000
	6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	100 %	Rp 102.295.400



		pemerintahan daerah		
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %	Rp 269.744.000
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	Rp 18.700.000
	1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	Rp 18.700.000
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi	100 %	Rp 15.002.000



		koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan		
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	Rp. 15.002.000
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	Rp 15.540.000
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	Rp 15.540.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kedungjati Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;



2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan
Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat	Nilai IKM	Indeks	B (85,6)
2	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	Nilai	BB (72)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungjati Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariata n yang sesuai SOP	100%	Rp 2.940.420.000
	1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Musrenbang dan tersusunnya dokumen rencana pembangunan di Kec. Grob.	1 kali	Rp 38.413.000
	2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan	100 %	Rp 2.047.674.000



		keuangan tepat waktu		
	3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Rp 8.295.000
	4). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	Rp 218.377.600
	5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	Rp 55.621.000
	6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan	100 %	Rp 102.295.400



		pemerintahan daerah		
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %	Rp 469.744.000
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	Rp 16.450.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	Rp 16.450.000
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi	100 %	Rp 15.002.000



		koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan		
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	Rp. 15.002.000
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	Rp 46.621.000
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	Rp 46.621.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh



berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi



instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungjati Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedungjati.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kedungjati Tahun 2025

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM,	Indeks Reforma si					



N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Birokrasi					
2	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat	Nilai IKM	B (84)	B (90,14)	107%	Sangat Tinggi	Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Kedungjati
3	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	BB (72)	BB (73,00)	101 %	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi SETDA Kab.Grobogan

Uraian penjelasan tabel :

- Dapat dilihat realisasi dari sasaran ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat indikator kinerja Nilai IKM Kecamatan Kedungjati Tahun 2025 sebesar B (90,14) dengan target nya B



(84) menunjukkan capaian sebesar 107% sehingga masuk kategori sangat tinggi. Capaian ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kedungjati. Tingginya nilai IKM Kecamatan Kedungjati dikarenakan hal-hal berikut ini :

1. Pelayanan yang berkualitas dan profesional :
 - 1) Prosedur yang mudah dan cepat
 - 2) Sikap petugas yang ramah dan responsif
 - 3) Keterampilan dan kompetensi petugas
 2. Infrastruktur dan fasilitas yang memadai :
 - 1) Fasilitas yang nyaman
 - 2) Teknologi yang mendukung
 3. Transparansi dan Akuntabilitas :
 - 1) Informasi yang jelas
 - 2) Mekanisme pengaduan yang efektif
 4. Kinerja yang konsisten
 - 1) Konsisten dalam pelayanan
 - 2) Pencapaian target yang terukur
- Untuk **Sasaran ke - 2** Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan indikator kinerja nilai SAKIP, Target untuk tahun 2025 BB (72) realisasi SAKIP Kecamatan Kedungjati tahun 2025 BB (73,00) capaiannya 101% sehingga masuk kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian nilai SAKIP Kecamatan Kedungjati yang melampaui target didukung oleh beberapa faktor, antara lain:
Komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam menerapkan SAKIP secara konsisten.
 1. Perencanaan kinerja yang lebih terarah dan selaras dengan indikator kinerja.
 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.



3. Peningkatan pemahaman aparatur dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja.
4. Dukungan serta pembinaan dari Pemerintah Kabupaten.

Kategori capaian IKU termasuk SANGAT TINGGI (persentase realisasi di atas 91 persen) .

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan										



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (82,00)	B (84,94)	103 %	B (83,00)	B (87,03)	105 %	B (84)	B (90,14)	107%
3	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	B (65)	B (63,27)	97 %	BB (70)	B (67,05)	95 %	BB (72)	BB (73,00)	101 %

Uraian penjelasan tabel :

Dapat dilihat dari tabel 3.3 untuk Sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat dengan indikator kinerja Nilai IKM Kecamatan Kedungjati pada Tahun 2023 memiliki realisasi B (84,60) dengan capaian 103% , Nilai IKM Kecamatan Kedungjati pada tahun 2024 memiliki realisasi B (87,03) dengan capaian 105% di tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi B (90,14) dengan capaian 107% dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tiap tahun nilai IKM Kecamatan Kedungjati selalu melampaui target. Capaian ini



mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik di Kecamatan Kedungjati.

Untuk Sasaran ke - 2 yaitu Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP, untuk tahun 2023 memiliki realisasi B (64,25) dengan capaian 94 % lalu tahun 2024 memiliki realisasi B (67,05) dengan capaian 95% ditahun 2025 mengalami kenaikan dengan realisasi BB (73,00) dengan capaian 101% Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 target Nilai SAKIP belum sepenuhnya tercapai, namun pada tahun 2025 target yang ditetapkan berhasil terlampaui dengan sangat baik. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan yang konsisten dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Ke depan, upaya perbaikan dan peningkatan kinerja akan terus dilakukan agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM,				



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
	sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan				
2	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat	Nilai IKM	B (90,14)	B (85)	106%
3	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	BB (73,00)	BB (73,5)	99,30%

Uraian penjelasan tabel :

Dapat dilihat dari Tabel 3.4 untuk sasaran ke-1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat dengan indikator Nilai IKM,



realisasi pada tahun 2025 sebesar B 90,14 jika dibandingkan dengan target Renstra Kecamatan Kedungjati 2021 - 2026 Nilai IKM Kecamatan Kedungjati memiliki Capaian 106 % yang mana sudah melebihi target Renstra.

Sedangkan Sasaran ke-2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP, realisasi pada tahun 2025 sebesar BB 73,00 jika dibandingkan dengan target renstra Kecamatan Kedungjati 2021 - 2026 Nilai SAKIP Kecamatan Kedungjati memiliki capaian 99 % yang mana belum melebihi target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar Kabupaten Grobogan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten Grobogan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan				



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
2	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (90,14)	A 90,14 nilai IKM Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan	100%
3	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	BB (73,00)	B (66,48) Nilai SAKIP Kabupaten Grobogan Tahun 2025	110%

Uraian Penjelasan:

Dengan Melihat Tabel diatas sasaran ke-1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat indikator Nilai IKM realisasinya B 86,62 sedangkan Nilai IKM Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan A 90,14 jadi capaian Kecamatan Kedungjati 96% dengan membandingkan nilai IKM Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Dapat dilihat untuk sasaran ke-2 Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kedungjati dengan indikator Nilai SAKIP memiliki realisasi BB 76,90 dengan capaian 116% dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Grobogan sebesar B 66,48.



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan						
2	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	B (84,00)	B (90,14)	107%	Berhasil	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur,



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							evaluasi pelayanan secara berkala berdasarkan masukan masyarakat, serta optimalisasi standar pelayanan dan sarana prasarana agar kepuasan masyarakat tetap terjaga.
3	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	BB (72)	BB (73,00)	101 %	Berhasil	Mempertahankan dan meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar capaian kinerja tetap optimal dan akuntabel.



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100%	100	100%	Berhasil	pelaksanaan kegiatan telah sesuai perencanaan, didukung koordinasi yang baik antar pihak terkait, serta partisipasi aktif dari perangkat kecamatan dan masyarakat
	1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Musrenbang dan tersusunnya dokumen rencana pembangunan di Kec. Grob.	1 Kali	1 Kali	100%	Berhasil	Pelaksanaan Musrenbang cam yang berjalan dengan baik mencerminkan proses perencanaan partisipatif di tingkat kecamatan berlangsung efektif
	a). terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Berhasil	Pelaksanaan Musrenbang cam yang berjalan dengan baik mencerminkan proses perencanaan partisipatif di tingkat kecamatan berlangsung efektif



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100	100%	Berhasil	tata kelola keuangan yang tertib dan tepat waktu
	a). Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 orang/bulan	100%	Berhasil	tata kelola keuangan yang tertib dan tepat waktu
	3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	100%	Berhasil	Manajemen kepegawaian yang efektif dan terstruktur
	a). Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%	Berhasil	pengadaan dilakukan tepat waktu, sesuai spesifikasi, serta telah didistribusikan kepada ASN sesuai kebutuhan dan jumlah yang direncanakan
	4). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100	100%	Berhasil	fungsi tata usaha dan pelayanan administrasi telah berjalan optimal



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	a). Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Berhasil	komponen yang dibutuhkan telah tersedia dan terpasang dengan baik, sehingga mendukung operasional kantor secara optimal
	b). Terlaksananya Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Berhasil	kebutuhan logistik kantor telah tersedia tepat waktu dan mendukung kelancaran aktivitas pelayanan dan administrasi perkantoran
	c). Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Berhasil	seluruh dokumen, formulir, dan kebutuhan cetak lainnya telah tersedia sesuai jumlah dan waktu yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan.



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	e). Terlaksananya Penyediaan bahan/material	Jumlah bahan/material yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Berhasil	kebutuhan material telah tersedia sesuai perencanaan dan digunakan secara efektif untuk mendukung operasional dan pemeliharaan fasilitas kantor
	f). Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	Berhasil	rapat telah dilaksanakan sesuai jadwal, diikuti oleh peserta yang relevan, dan menghasilkan kesepakatan serta tindak lanjut yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan
	5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100%	100	100%	Berhasil	Perencanaan kebutuhan barang yang sesuai prioritas dan anggaran



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	b). Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	1 Unit	100 %	Berhasil	sarana dan prasarana yang dibutuhkan telah tersedia dan terpasang dengan baik, sehingga mendukung fungsi dan operasional gedung secara optimal
	6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100	100%	Berhasil	Dukungan operasional pemerintahan berjalan optimal
	a). Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%	Berhasil	kebutuhan pengiriman dan penerimaan surat dinas telah terlaksana dengan lancar, tepat waktu
	b). Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Berhasil	layanan komunikasi, air bersih, dan listrik tersedia tanpa gangguan,



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							sehingga mendukung kelancaran operasional dan pelayanan di lingkungan kantor
	c). Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Berhasil	kebersihan, keamanan, dan administrasi umum terlaksana dengan baik
	7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	100	100%	Berhasil	Tata kelola aset yang baik guna mendukung pelayanan publik yang berkelanjutan
	a). Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Bulan	12 Bulan	100%	Berhasil	kendaraan dalam kondisi terawat, layak operasional, dan kewajiban perpajakannya telah dipenuhi tepat waktu
	b). Terlaksananya Pemeliharaan/	Jumlah Gedung kantor Atau	4 unit	4 unit	100%	Berhasil	kegiatan pemeliharaan telah



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Rehabilitasi Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi					dilakukan tepat waktu dan sesuai kebutuhan, sehingga kondisi bangunan tetap terjaga, aman, dan mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.
	c). Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	100%	Berhasil	sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi telah diperbaiki dan dipelihara,
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	100	100%	Berhasil	kegiatan yang dilaksanakan mampu meningkatkan partisipasi, kapasitas, dan kemandirian masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam pembanguna



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							n berbasis potensi lokal
	3). Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menghasilkan rekomendasi	150 Keluarga	150 Keluarga	100%	Berhasil	Kegiatan ini berhasil karena pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berjalan dengan baik sehingga seluruh target 150 Keluarga dapat tercapai dan menghasilkan rekomendasi sesuai rencana, dengan capaian kinerja 100%
	a). Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk	150 Keluarga	150 Keluarga	100%	Berhasil	Sub kegiatan ini berhasil karena seluruh target 150 Keluarga dapat mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam bidang



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing					pendidikan dan keterampilan sehingga capaian kinerja mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan.
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	100	100%	Berhasil	kegiatan yang mendukung stabilitas pemerintahan, ketertiban umum, dan koordinasi lintas sektor telah dilaksanakan secara efektif, serta mampu memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dan berbagai stakeholder
	1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan	100%	100	100%	Berhasil	keberhasilan dalam membangun semangat kebangsaan dan memperkuat nilai-nilai dasar negara



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		wawasan kebangsaan					
	a). Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 Kali	1 kali	100%	Berhasil	seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT RI telah terlaksana dengan lancar, melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air di lingkungan kecamatan
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase desa dengan tertib administrasi	12 desa/kecamatan	12 desa/kecamatan	100%	Berhasil	kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi



No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						telah dilaksanakan secara rutin dan terarah, sehingga meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
	1). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	100	100%	Berhasil	Pendampingan rutin terhadap administrasi desa sesuai regulasi
	a). Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 desa/kelurahan	12 desa/kelurahan	100%	Berhasil	Pendampingan rutin terhadap administrasi desa sesuai regulasi

Uraian penjelasan tabel :



Berhasilnya pencapaian tersebut karena beberapa faktor pendukung diantaranya :

1. Pembinaan secara konsisten di semua level kepemimpinan (eselon/leader)
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang terus dilakukan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran.
3. Partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan contohnya pada kegiatan Musrembangcam di Kecamatan Kedungjati
4. Kolaborasi antar Stakeholder terutama pada kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan lancar.
5. Monitoring dan Evaluasi yaitu Dilakukannya pemantauan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai target.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Tujuan - Meningkatka n kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar						



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan						
2	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada Masyarakat	Nilai IKM	101 %				Menunjang
3	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	106%				Menunjang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persenta se layan dukung an administ rasi kesekret ariat an yang sesuai SOP	100%	Menunja ng
				1). Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksa nanya Musren bang dan tersusun nya dokume n rencana pemban gunan di Kec. Grob.	100%	Menunja ng



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				a). terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	Menunjang
				a). Terlaksananya Penyediaan Gaji dan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan	100%	Menunjang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Tunjangan ASN	Tunjang an ASN		
				3). Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persenta se Adminis trasi Kepega waian Perangk at Daerah	100%	Menunja ng
				a). Terlaksanan ya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengk apannya	100%	Menunja ng
				4). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persenta se pemenu han Adminis trasi umum	100%	Menunja ng



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
					Perangkat Daerah		
				a). Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				b). Terlaksananya Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				c). Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan	Jumlah barang cetakan dan penggunaan	100%	Menunjang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				penggandaan	yang disediakan		
				d). Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang- undangan yang disediakan	100%	Menunjang
				e). Terlaksananya Penyediaan bahan/mate- rial	Jumlah bahan/ material yang disediakan	100%	Menunjang
				f). Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Menunjang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				konsultasi SKPD			
				5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persenta se pengada an Barang milik daerah penunja ng urusan pemerin tah daerah tepat waktu	100%	Menunja ng
				a). Terlaksanan ya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediak an	100%	Menunja ng
				b). Terlaksanan ya Pengadaan sarana dan	Jumlah Pengada an sarana dan	100%	Menunja ng



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	prasaran a Gedung kantor atau banguna n lainnya yang diadaka n		
				6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persenta se pemenu han kebutuh an jasa penunja ng urusan pemerin tahan daerah	100%	Menunja ng
				a). Terlaksanan ya Penyediaan	jumlah laporan penyedi aan jasa surat	100 %	Menunja ng



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				jasa surat menyurat	menyur at		
				b). Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyedi aan jasa komuni kasi, sumber daya air dan Listrik yang disedi akan	100%	Menunja ng
				c). Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang disedi akan	100%	Menunja ng
				7). Pemeliharaa a	persenta se	100%	Menunja ng



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	barang milik daerah penunja ng urusan pemerin tahan daerah yang terpelih ara		
				a). Terlaksanan ya Penyediaan jasa pemeliharaan n, biaya pemeliharaan n, dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendara an peroran gan Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan yang dipeliha ra dan dibayar kan	100%	Menunja ng



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
					pajaknya		
				b). Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	100%	Menunjang
				c). Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/ terpelihara	100%	Menunjang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAHA N	Persenta se lembaga masyara kat aktif	100%	Menunja ng
				b). Terlaksanan ya Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksa nakan pember dayaan Masyara kat di keluraha n	100%	Menunja ng
				2). Pemberdaya an dan Kesejahteraa n Keluarga Tingkat Kecamatan	Pelaksa naan koordin asi pember dayaan masyara	100%	Menunja ng



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				dan Kelurahan	kat desa dan keluraha n yang mengha silkan rekome ndasi		
				a). Terlaksanan ya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudka n Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang mengik uti peningk atan kesadar an keluarga dalam peningk atan pendidi kan dan keteram pilan untuk mewuju dkan	100%	Menunja ng



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
					SDM yang berkualitas dan berdaya saing		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	Menunjang
				1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat	100%	Menunjang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Sesuai Penugasan Kepala Daerah	kat yang mendap atkan fasilitasi koordin asi dan pembina an wawasa n kebangs aan		
				a). Terlaksanan ya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Jumlah kegiatan pembina an wawasa n kebangs aan dan ketahan an nasiona l	100%	Menunja ng



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	100%	Menunjang



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				1). Fasilitasi, Rekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah n Desa	Persenta se desa dengan tertib administ rasi	100%	Menunja ng
				a). Terlaksanan ya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah n Desa	Jumlah Desa yang difasilita si Adminis trasi Tata Pemerin tahan Desa	100%	Menunja ng

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum dapat disimpulkan bahwa output (keluaran) dari seluruh kegiatan dan sub kegiatan telah memberikan kontribusi dalam mendorong pencapaian outcome (hasil) program sehingga mendukung tercapainya sasaran dan tujuan organisasi. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat satu sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Bimbingan



Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, yang disebabkan oleh adanya perubahan anggaran sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga kegiatan tersebut pada tahun 2025 ditiadakan.

Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.940.420.000	Rp 2.848.648.509	96,88%
a.	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 38.413.000	Rp 35.813.000	93,23 %
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.047.675.000	Rp 1.975.133.716	96,46 %
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 8.295.000	Rp 8.250.000	99,46 %
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 218.377.600	Rp 216.173.200	99,77 %



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 55.621.000	Rp 54.998.900	98,88 %
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 102.295.400	Rp 94.557.883	92,44 %
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 469.744.000	Rp 463.721.810	98,72 %
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 16.450.000	Rp 15.180.000	92,28 %
a.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp 16.450.000	Rp 15.180.000	92,28 %
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 15.002.000	Rp 14.202.000	94,67%
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 15.002.000	Rp 14.202.000	94,67%
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 46.621.000	Rp 45.300.000	97,17%



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 46.621.000	Rp 45.300.000	97.17%

B. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan							



No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
2	Sasaran - 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	B (84)	B (90,14)	107 %	Rp 78.073.000	Rp 74.682.000	95,65 %	Efisien
3	Sasaran - 2 Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	BB (72)	BB (73,00)	106 %	Rp 2.940.420.000	Rp 2.848.648.509	96,87 %	Efisien

Uraian penjelasan tabel :

Tujuan : Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kedungjati menunjukkan hasil **Efisien**.

Sasaran ke 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat menunjukkan hasil **Efisien** sedangkan **Sasaran ke 2** Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kedungjati menunjukkan hasil **Efisien**

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal sehingga mampu



mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kedungjati.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE N/KOT	100	100	100%	Rp 2.940.4 20.000	Rp 2.848.6 48.509	96,88 %	Efisien
	1). Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kali	1 Kali	100 %	Rp 38.413.00 0	Rp 35.813.0 00	93,23 %	Efisien
	a). Penyusunan Dokumen Perencanaa	1 Kali	1 Kali	100 %	Rp 38.413.00 0	Rp 35.813.0 00	93,23 %	Efisien



No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	n Perangkat Daerah							
	2). Administ rasi Keu angan Perang kat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 2.047.674 .000	Rp 1.975.13 3.716	96,46 %	Efisien
	a). Penyedia an Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 2.047.674 .000	Rp 1.975.13 3.716	96,46 %	Efisien
	3). Administ rasi Kepegawa ian Perang kat Daerah	100	100	100 %	Rp 8.295.000	Rp 8.250.00 0	99,46 %	Efisien
	a). Pengada an Paka ian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	1 Paket	1 Paket	100 %	Rp 8.295.000	Rp 8.250.00 0	99,46 %	Efisien
	4). Administ rasi Umum Perang kat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 218.377.6 00	Rp 216.173. 200	98,99 %	Efisien



No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	a). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 11.045.00 0	Rp 11.023.5 00	99,81 %	Impas
	b). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 95.882.00 0	Rp 75.670.7 00	99,06 %	Efisien
	c). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 9.994.600	Rp 8.941.70 0	89,47 %	Efisien
	e). Penyediaan Bahan/Mat erial	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 32.396.00 0	Rp 32.227.3 00	99,48 %	Efisien
	f). Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 69.050.00 0	Rp 69.000.0 00	99,91 %	Efisien



No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100%	Rp 55.621.00 0	Rp 54.998.9 00	98,88 %	Efisien
	a). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100 %	Rp 55.621.00 0	Rp 54.998.9 00	98,88 %	Efisien
	6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 102.295.4 00	Rp 94.557.8 83	92,44 %	Efisien
	a). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 20.100.00 0	Rp 20.100.0 00	100,00 %	Impas
	b). Penyediaan Jasa	12 Lapor an	12 Laporan	100 %	Rp 32.057.40 0	Rp 26.659.8 83	83,16 %	Efisien



No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik							
	c). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 50.138.00 0	Rp 47.798.0 00	95,33 %	Efisien
	7). Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	100	100	100%	Rp 469.744.0 00	Rp 463.721. 810	98,72 %	Efisien
	a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan n, Biaya Pemeliharaan n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	60.124.00 0	56.393.3 10	93,80 %	Efisien



No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Dinas Jabatan							
	b). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	100 %	Rp 400.000.000	Rp 398.848.500	99,71 %	Efisien
	c). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Rp 9.620.000	Rp 8.480.000	88,15%	Impas
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	100%	Rp 16.450.000	Rp 15.180.000	92,28 %	Efisien
	1). Pemberdayaan dan Kesejahteraan	150 Keluarga	150 Keluarga	100 %	Rp 16.450.000	Rp 15.180.000	92,28 %	Efisien



No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	an Keluarga Tingkat Kecamatan							
	a). Peningkata n Kesadaran Keluarga dalam Peningkata n Pendidikan dan Keterampila n untuk Mewujudka n Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berday a Saing	150 Kelua rga	150 Keluarg a	100 %	Rp 16.450.00 0	Rp 15.180.0 00	92,28 %	Efisien
3.	PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	1 Kali	1 Kali	100%	Rp 15.002.00 0	Rp 14.202.0 00	100%	Efisien



No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	1). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kali	1 Kali	100%	Rp 15.002.00 0	Rp 14.202.0 00	100%	Efisien
	a). Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	1 Kali	1 Kali	100%	Rp 15.002.00 0	Rp 14.202.0 00	100%	Efisien



No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
4.	PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWA SAN PEMERINT AHAN DESA	12 Desa/ Kelur ahan	12 Desa/K eluraha n	100%	Rp 46.621.00 0	Rp 45.300.0 00	97,17%	Efisien
	1). Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintah an Desa	100	100	100%	Rp 46.621.00 0	Rp 45.300.0 00	97,17%	Efisien



No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	a). Fasilitasi Administras i Tata Pemerintah an Desa	12 Desa/ Kelur ahan	12 Desa/K eluraha n	100%	Rp 46.621.00 0	Rp 45.300.0 00	97,17%	Efisien

Uraian penjelasan tabel :

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 4 Program yang dilaksanakan di Kecamatan Kedungjati terdapat 5 Program yang efisien dalam mengelola anggaran dan menghasilkan output sesuai target. Sedangkan untuk kegiatan dari 10 Kegiatan yang dilaksanakan 10 kegiatan efisien dalam pengelolaan anggaran dan menghasilkan output yang mencapai target. Lalu dari total 23 sub kegiatan pada Kecamatan Kedungjati ada 17 yang efisien dalam mengelola anggaran dan menghasilkan output sesuai target sedangkan 1 subkegiatan yang lainnya impas dikarenakan tidak ada anggaran yang tersisa meskipun output telah mencapai target.



BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran ke 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 107 % (kategori Efisien)
- Sasaran ke 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 101 % (kategori Efisien)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang



ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.080.463.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 3.025.029.384, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 96,85 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 3,15%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Grobogan, 23 Februari 2026

CAMAT KEDUNGJATI

KABUPATEN GROBOGAN



KUSPRIYATI, S.S.T.P., M.H.

NIP. 19790920 199810 2 001

Pembina Tk. I (IV/b)